



Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Keberlanjutan Kelompok Tani Hutan di Tahura Ngargoyoso, Karanganyar

Jenita Sri Ratna Ning Tyas¹⁾, Yosafat Hermawan Trinugraha²⁾

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Jenitasrtna_23@student.uns.ac.id¹⁾
yosafathermawan@staff.uns.ac.id²⁾

Abstrak

Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I merupakan satu-satunya hutan konservasi di Jawa Tengah. Ancaman kerusakan hutan dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan menjadi perhatian serius yang harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan mengungkap peran modal sosial Kelompok Tani Hutan selaku bagian dari masyarakat dalam turut serta mengelola hutan konservasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada Kelompok Tani Hutan dan pihak Pengelola Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi Kelompok Tani Hutan menerapkan modal sosial dalam pengelolaan Tahura. Unsur modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan yang terjalin mendorong pengelolaan hutan secara optimal. Rasa percaya terwujud antara kelompok tani hutan dengan berbagai pihak menjadi penguat kerjasama mereka. Dalam kerjasama yang terbentuk juga terdapat norma-norma yang harus dipatuhi guna adanya kontrol tindakan beberapa pihak yang memicu kerusakan hutan. Rasa percaya dan norma-norma tersebut tumbuh dalam jaringan yang dijalin kelompok tani hutan dengan beberapa pihak terkait. Temuan ini dapat menambah wawasan kita terkait interaksi sosial yang terjalin mampu meningkatkan pengoptimalan pengelolaan Tahura.

Kata kunci: Kelompok Tani Hutan, Tahura, Modal Sosial

Abstract

KGPA Mangkunagoro I Grand Forest Park is the only conservation forest in Central Java. The threat of forest destruction and community dependence on forests is a serious concern that must be taken into account. This research aims to reveal the role of social capital of Forest Farmer Groups as part of the community in participating in managing conservation forests. The research method used in this research is qualitative with a case study approach. Data was obtained through interviews conducted with the Forest Farmers Group and the Management of the KGPA Mangkunagoro I Forest Park Office. The results of the research showed that the participation of the Forest Farmers Group applied social capital in managing Tahura. Elements of social capital in the form of trust, norms and established networks encourage optimal forest management. The sense of trust created between forest farmer groups and various parties strengthens their cooperation. In the collaboration that is formed, there are also norms that must be adhered to in order to control the actions of several parties that trigger forest destruction. This sense of trust and norms grows in the network established by forest farmer groups with several related parties. These findings can add to our insight regarding social interactions that can improve the optimization of Tahura management.

Keywords: Forest Farmer Groups, Tahura, Social Capital



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau di dalamnya, dan dihuni oleh sekitar 269.000.000 juta penduduk Indonesia. Tersebar dari sabang-merauke, kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah. Bahkan Indonesia sering mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Julukan paru-paru dunia ini mengindikasikan luasnya wilayah hutan di Indonesia. Hutan memiliki peranan penting sebagai paru-paru dunia, yakni menyokong keberlangsungan makhluk hidup dengan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup (Febryanti, 2023). Indonesia memiliki wilayah hutan yang cukup luas, disebutkan oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa luas hutan di Indonesia menjangkau 106,5 ha (Sari, 2024). Umumnya, hutan berada di wilayah yang dekat dengan pegunungan. salah satunya di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan hutan yang cukup luas yakni 48,6 ribu ha. Kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah ini terbagi menjadi tiga kawasan yaitu kawasan perlindungan dengan luas 21,3 ribu ha, kawasan untuk produksi dengan luas 24,8 ribu ha, serta kawasan untuk pengguna lain dengan luas 2,5 ribu ha. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, kawasan lindung dalam hal ini berupa cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu daerah yang dikenal cukup potensial dalam hal pelestarian hutan. Apalagi wilayahnya yang berdekatan dengan gunung lawu.

Di Kabupaten Karanganyar terdapat kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya yang terdapat di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan luas kurang lebih 2.318 ha. Wilayah Tahura ini sudah terjadi perluasan sehingga mencakup daerah Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Taman Hutan Raya merupakan salah satu hutan dengan sumber daya alam yang tidak tertandingi. Taman Hutan Raya atau disingkat dengan Tahura ini merupakan kawasan yang difokuskan untuk konservasi flora dan fauna serta juga dipotensikan sebagai sasaran penelitian guna menunjang ilmu pengetahuan dan juga sebagai objek wisata karena pemandangan di dalamnya yang begitu menawan untuk menarik wisatawan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Tahura memiliki banyak sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, hutan menjadi sumber dari berbagai macam produk, seperti, kayu, daun, akar, getah, buah, bunga, dan lainnya, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku untuk menunjang industrinya. Bahkan dapat dikatakan, hampir semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan hadirnya hutan.

Tahura KGPAA Mangkunagoro I menjadi satu-satunya kawasan pelestarian alam di Jawa Tengah, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Seiring dengan bertambahnya waktu, penduduk semakin berkembang jumlahnya, yang mana juga mempengaruhi kelestarian dan keseimbangan alam hutan. Sebagaimana yang disampaikan Widiyanto (2015) bahwa keberadaan masyarakat di daerah penyangga atau daerah sekitar hutan, memiliki ketergantungan terhadap hutan dan memungkinkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak hutan. Beberapa tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor, baik secara sosial maupun ekonomi. Masyarakat di sekitar hutan kebanyakan memiliki riwayat pendidikan yang terbatas dan mata pencahariannya bergantung pada hutan. Beberapa dari mereka, karena desakan ekonomi, memungkinkan melakukan tindakan yang merusak hutan, seperti pencurian, perburuan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hutan tidak berfungsi dengan baik.

Di sisi lain, Tahura juga berpotensi mengalami kerusakan karena faktor lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aji Kurniawan (2020) bahwa Taman Hutan Raya (TAHURA) KGPAA Mangkunagoro I terancam terabaikan. Karena keadaan layout kawasan masih kurang jelas, sehingga menyebabkan kurang tegasnya zonasi yang menunjukkan zona wisata dan konservasi. Hal ini bisa menyebabkan para pengunjung baik wisatawan, peneliti, maupun masyarakat sekitar kurang menjaga dan peduli dengan kelestarian TAHURA sebagai wilayah konservasi. Selain itu, disebutkan bahwa aspek penting dari permasalahan di TAHURA ini yaitu kurangnya peran para pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, masyarakat,



lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok swasta masih kurang memahami besarnya potensi dan beragam nilai yang tersimpan di dalam TAHURA KGPAA Mangkunagoro I. Kurangnya kesadaran dari berbagai pihak tersebut mengancam kelestarian TAHURA itu sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanti (2023), memberikan penjelasan bahwa masyarakat di Kampung Kapitan, Kecamatan Belinyu khususnya kelompok tani hutan memiliki tingkat partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya wilayah pantai yang cukup rendah. Gambaran yang diberikan melalui penelitian ini bahwa adanya modal sosial mampu mendongkrak semangat dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian pantai di Kampung Kapitan. Kehadiran Kelompok Tani Hutan menjadi organisator yang memanfaatkan modal sosial masyarakat dengan membangun, menjembatani, dan menghubungkan relasi. Penelitian selanjutnya di Buhung Lali dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) masyarakat mampu membangun ikatan kepercayaan dan jaringan dengan baik sehingga proses penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengelolaan hutan dapat tersampaikan dengan optimal (Sabar, 2022). Kemudian pada penelitian yang dilakukan di Hutan Lindung Kalahan, Filipina, menunjukkan adanya modal sosial berpengaruh terhadap pengelolaan hutan. Kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat lokal terlaksana dengan didasari kepercayaan antar satu sama lain, sehingga pengelolaan Hutan Lindung berjalan dengan lestari (Dahal, 2008).

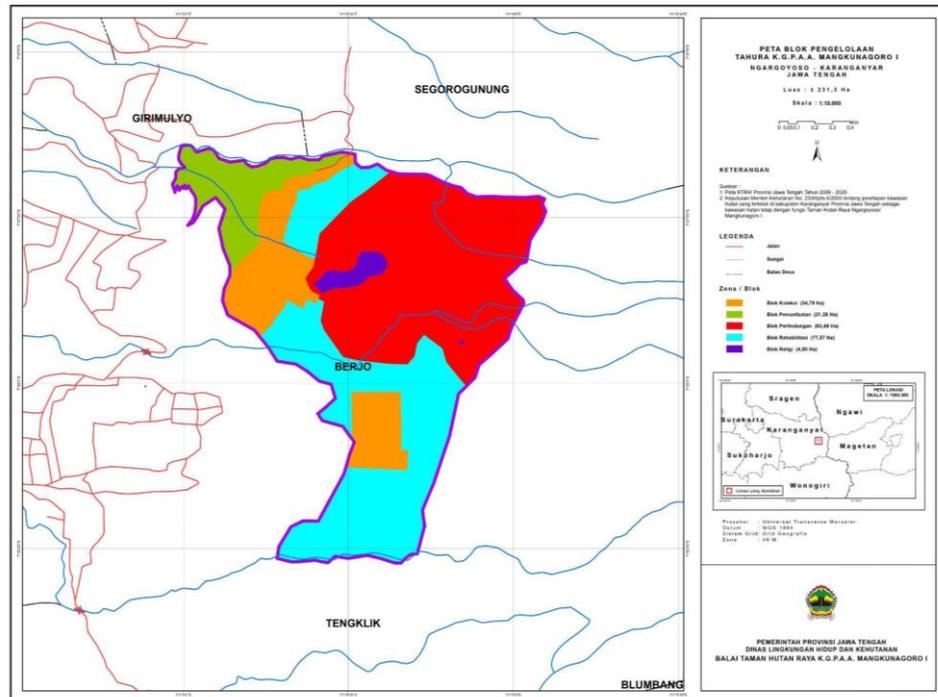
Melalui penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji modal sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam mengelola Tahura KGPAA Mangkunagoro I. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. Peran ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu fenomena melalui wawancara mendalam secara alamiah yang berfokus pada satu objek untuk mengungkap suatu realita (Assyakurohim, 2023). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memfokuskan pada pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Pengurus Balai di Tahura. Adapun sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan observasi lapangan terkait fenomena yang terjadi dan penulis melakukan wawancara mendalam terhadap informan. Teknik triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk mengurangi adanya keabsahan data. Triangulasi dilakukan untuk menghindari adanya bias dari suatu data yang didapatkan (Alfansyur, 2020). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan luas 2.318 hektar. Luas sebelumnya hanya 231,3 hektar yang kemudian di tahun 2023 ini disetujui untuk diperluas, sehingga wilayahnya mencakup Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Awalnya, Tahura merupakan hutan lindung yang berada dibawah pengawasan Perhutani. Kemudian Tahura dinaikkan statusnya sebagai hutan konservasi dan berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahura KGPAA Mangkunagoro I menjadi kawasan pelestarian alam dengan melakukan perlindungan terhadap daerah sumber mata air, pengawetan flora dan fauna agar tidak punah, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal dan seimbang. Pengelolaan Tahura dilakukan dengan sistem bloking dan tetap melibatkan masyarakat guna menuju pengelolaan hutan yang seimbang dan lestari.



Sumber : Tahura KGPAA Mangkunagoro I 2024
Gambar 1 Peta Blok Pengelolaan Tahura

Blok di Tahura terbagi menjadi 5 blok, yaitu blok koleksi, blok pemanfaatan, blok perlindungan, blok rehabilitasi, dan blok religi. Blok koleksi merupakan kawasan yang difokuskan untuk penempatan koleksi tumbuhan maupun satwa. Blok koleksi ini luasnya sebanyak 34,79 ha. Pada blok pemanfaatan dengan luas 21,28 ha merupakan kawasan yang umumnya didominasi oleh aktivitas manusia, seperti tempat rekreasi, fasilitas kantor, mushola, cafe, villa, serta kawasan yang sering diambil rumputnya oleh masyarakat atau biasa disebut dengan istilah araman. Sedangkan orang yang mengambil araman disebut dengan pengaram. Para masyarakat atau pengaram memiliki petaknya masing-masing di Tahura yang ditanami rumput untuk pakan ternaknya. Pengaram hanya memiliki kepemilikan atas rumputnya saja, bukan lahannya. Kawasan araman ini biasa disebut juga sebagai blok tradisional, karena berlangsung secara turun-temurun sejak belum adanya Tahura. Blok selanjutnya yaitu blok perlindungan, memiliki luas 93,49 ha. Blok perlindungan digunakan sebagai kawasan untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka dan aktivitas manusia pada kawasan ini dibatasi. Terdapat juga blok rehabilitasi yakni sebagai kawasan lahan-lahan yang dianggap kritis. Blok terakhir yaitu blok religi. Blok religi ini merupakan kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan keagamaan. Didalam blok religi ini terdapat beberapa situs seperti Cemoro Bulus, Cemoro Pogog, Watu Lumpang, dan Sendang Raja.

Pengelolaan Tahura yang melibatkan masyarakat ini, memanfaatkan modal sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan dalam upaya menjaga konservasi hutan agar tetap lestari. Adanya modal sosial merupakan buah dari relasi sosial yang terjalin antar individu maupun kelompok. Semakin luas relasi sosial seseorang, maka modal sosial yang dimiliki akan semakin besar (Hapsari, 2021). Peran masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan Tahura melalui kelompok sosial yang dibentuk oleh Pengurus Balai Tahura mulai tahun 2021 yaitu dibentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH). Anggota dari KTH sendiri adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah penyangga atau daerah yang berbatasan langsung dengan hutan. KTH yang berada di bawah naungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I ada dua yaitu KTH Tambak Indah dan KTH Green Lawu. Perbedaan diantara keduanya, KTH Tambak Indah dibentuk pada tahun 2021 dan berfokus pada pembibitan. Sedangkan KTH Green Lawu berfokus pada budidaya



anggrek. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana modal sosial kelompok tani hutan dalam mengelola Tahura KGPA Mangkunagoro I. Dalam hal ini terdapat tiga unsur modal sosial yang dimiliki yaitu, kepercayaan yang terbentuk antar anggota kelompok tani hutan dengan pihak pengelola Balai Tahura, juga dengan semua pihak terkait yang mendukung pengelolaan Tahura. Kedua, norma yang menjadi pedoman Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan Tahura. Ketiga, jaringan sosial yang terjalin baik secara internal maupun eksternal.

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan perasaan jujur yang dimiliki seseorang terhadap seseorang atau situasi berdasarkan perasaan dan keadaan yang mereka alami (Harjana, 2024). Kepercayaan tertanam seiring dengan berjalannya waktu. Kepercayaan menjadi kunci utama optimalnya program suatu kelompok karena kepercayaan menjadi dasar hubungan mereka. Semakin besar rasa percaya antar satu sama lain, maka kerjasama yang terjalin akan semakin kuat (Hapsari, 2021). Dengan terjalinnya kerjasama yang baik, maka pengelolaan Tahura akan lebih maksimal. Kepercayaan yang terjalin dalam pengelolaan Tahura berjalan secara bertahap. Tahura KGPA Mangkunagoro I sebelumnya merupakan hutan lindung yang berada dibawah naungan Perhutani, kemudian dialihfungsikan sebagai taman hutan raya dan diberi nama Tahura KGPA Mangkunagoro I. Awal mula adanya Tahura, masyarakat setempat masih terjadi pro dan kontra. Beberapa pelanggaran seperti perburuan liar, pencurian sumber daya alam, dan lain-lain masih dilakukan oleh masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dapat menanamkan rasa percaya kepada pihak pengelola balai. Terbukti dengan partisipasi masyarakat melalui dibentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH dibentuk untuk mengurangi ketergantungan masyarakat setempat terhadap hutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) mendapat kepercayaan dari petugas balai Tahura untuk menjalankan program-program konservasi seperti pembibitan, budidaya anggrek langka, dan penanaman pohon. Program pembibitan ini dilakukan secara berlanjut khususnya pada waktu musim hujan. Untuk program penanaman pohon, tidak hanya dilakukan oleh satu KTH saja melainkan dua KTH turut berpartisipasi. Penanaman pohon menjadi fokus utama peran hutan untuk meningkatkan debit sumber mata air. Hutan yang dijaga dengan baik, perannya dalam menyerap air dan menyimpannya untuk menghasilkan sumber mata air yang banyak, dapat lebih optimal (Fitriandhini, 2022)

Terjalinya rasa percaya antara kelompok tani hutan dengan petugas balai mendorong pengelolaan Tahura yang lestari. Para kelompok tani hutan selalu memusyawarahkan setiap program apa yang ingin dijalankan melalui penasehat dari tiap kelompok tani kemudian diusulkan kepada Subbagian Pemanfaatan Balai Tahura. Petugas balai bertanggung jawab sebagai pendamping kelompok tani dengan memberikan sosialisasi, studi banding, pelatihan, dan pemberdayaan. Melalui program CSR Pertamina yang merupakan kerjasama antara Pertamina dan Balai Tahura dengan melibatkan KTH, memberikan benefit baru yang dirasakan masyarakat. Program CSR Pertamina memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang tergabung dalam KTH dalam hal pembuatan *green house* dan pendanaan terkait pembibitan dan budidaya anggrek lawu. Kelompok tani hutan melihat manfaat dari program CSR Pertamina, sehingga terjalin hubungan kepercayaan antara Pertamina, Balai tahura, dan kelompok tani hutan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, masyarakat yang tidak tergabung dalam anggota KTH mayoritas tergabung sebagai pengaram. Namun, sebagian dari pengaram juga merupakan kelompok tani hutan. Pengaram merupakan mereka yang memiliki kepemilikan rumput sesuai petaknya masing-masing di Tahura. Para pengaram ini mempercayakan sepenuhnya terhadap petugas balai terkait pengelolaan petak-petak rumput yang terbentuk secara imajiner. Tiap individu memiliki kepemilikan rumput dari luas petak yang berbeda-beda, karena berlaku secara turun-temurun. Untuk itu, pihak petugas pengelola balai berperan sebagai pihak ketiga apabila terjadi perselisihan antara pengaram satu dengan yang lain, misalnya pencurian rumput. Sebaliknya, petugas balai juga memberikan rasa percaya kepada masyarakat untuk menjaga Tahura.

Keberadaan petugas balai yang hanya dapat mengawasi Tahura secara terbatas, memerlukan kerjasama masyarakat untuk menjaga Tahura, apalagi posisi mereka yang dekat dengan Tahura sehingga bisa 24 jam mengawasi jika ada pihak yang merusak hutan. Petugas balai Tahura percaya penuh terhadap masyarakat dan bekerjasama dengan masyarakat.

Dengan adanya bukti nyata hasil dari pengelolaan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I, rasa kepercayaan muncul. Masyarakat yang sebelumnya menunjukkan penentangan terhadap pendirian TAHURA setelah alih fungsi lahan, sekarang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan karena mengetahui manfaatnya. Masyarakat akan menjadi lebih sadar bahwa menjaga alam lebih penting daripada kepentingan pribadi.

2. Norma

Norma, menurut Putnam, adalah kumpulan aturan yang diharapkan oleh suatu kelompok masyarakat untuk dipatuhi (Fathy, 2019). Norma berupa hal-hal yang harus diikuti oleh orang-orang sebagai pedoman bertingkah laku sehingga menciptakan suasana yang teratur, aman, dan tertib. Dalam pengelolaan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I, terdapat norma tertulis dan tidak tertulis yang digunakan. Dengan adanya norma sosial di masyarakat, kesejahteraan dapat diraih bersama. Masyarakat saat ini mengadopsi prinsip gotong royong dan rasa kebersamaan. Hal tersebut merupakan tradisi lokal yang sejak lama diketahui. Gotong royong merupakan nilai lokal yang turun-temurun sebagai ciri khas bangsa Indonesia (Subagyo, 2012).

Dalam kelompok tani hutan, ada kebiasaan gotong royong yang kuat, yang menunjukkan bahwa tradisi lokal memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya bersama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo dkk. (2021), norma lokal seperti gotong royong dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Tahura KGPAA Mangkunagoro I, gotong royong menjadi identitas sosial kelompok tani, di mana setiap anggota merasakan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian hutan.

Dalam norma tertulis terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) dibentuk sebagai pelaku kegiatan dibidang kehutanan seperti pembibitan pohon, penanaman dan pemeliharaan hutan, serta perlindungan dan konservasi alam. Sedangkan pada norma tidak tertulis, Kelompok Tani Hutan (KTH) selama melakukan kegiatan konservasi dilarang melakukan perburuan liar, pencurian sumber daya alam, dan kegiatan lain yang merusak hutan. Aturan ini juga berlaku untuk semua masyarakat termasuk pengunjung Tahura. Setiap kegiatan yang masuk dalam blok tertentu seperti blok rehabilitasi dan blok perlindungan, memerlukan izin dari pihak petugas balai dan wajib didampingi.

Norma dibuat untuk disepakati dan dipatuhi. Apabila norma dilanggar, maka akan diberikan sanksi. Adapun sanksi yang berlaku di Tahura apabila aturan-aturan yang ada telah dilanggar yaitu diberikan peringatan tegas sebanyak tiga kali. Apabila peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka akan dilakukan tindakan tegas lebih lanjut dari petugas balai Tahura.

3. Jaringan sosial

Jaringan sosial merupakan unsur penting dalam modal sosial yang menjadi media interaksi dan pertukaran informasi yang terus berlanjut (Hapsari, 2020). Dalam sebuah jaringan, interaksi antar kelompok dapat meningkatkan kemampuan kelompok untuk menangani masalah dan mempercepat pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan pelestarian hutan, KTH mengembangkan jaringan yang melibatkan masyarakat dan pengelola TAHURA. Kelompok Tani Hutan memiliki unsur solidaritas yang membentuk jaringan sosial baik di dalam maupun di luar kelompok, seperti diadakannya pertemuan KTH secara teratur. Ini menunjukkan bahwa KTH memiliki struktur organisasi yang jelas.

Kelompok Tani Hutan (KTH) menjalin hubungan kerjasama dengan petugas balai Tahura. Dalam program konservasi Tahura, pihak pengelola balai Tahura berperan sebagai pembuat kebijakan, sedangkan kelompok tani berperan sebagai pelaksana kebijakan. Dalam



keberjalannya, kelompok tani mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait program-program konservasi dari petugas balai Tahura. Kelompok tani diberikan ilmu-ilmu dasar dalam mengelola hutan. Melalui hubungan jaringan ini memberi kelompok tani hutan akses ke berbagai bentuk dukungan, termasuk pelatihan teknis, bantuan material seperti bibit, dan informasi tentang kebijakan kehutanan yang mendukung. Petugas pengelola balai Tahura juga berperan sebagai pendamping dan perantara kelompok tani dalam program pemberdayaan dengan pihak eksternal lain. Hal ini terwujud dalam jaringan yang dijalin dengan Pertamina melalui program CSR. Melalui program CSR ini, kelompok tani hutan mendapatkan sponsor pendanaan untuk meningkatkan keberhasilan pembibitan pohon di tahura. Selain itu, kerja sama dengan Pertamina ini juga diadakannya acara *Lawu Floral Festival* yang merupakan pameran anggrek lawu yang dihadiri oleh masyarakat umum. Hal ini memberikan kesempatan dan benefit kepada kelompok tani hutan untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pohon-pohon konservasi maupun tanaman-tanaman langka.

Konsep bridging modal sosial diungkapkan oleh Woolcock (dalam Saputra 2023), yang menyatakan bahwa hubungan dengan pihak luar dapat memungkinkan akses ke sumber daya yang lebih luas. Memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah atau pihak eksternal lain cenderung membuat kelompok tani hutan lebih sukses dalam mengelola Tahura. Selain itu, jaringan ini memungkinkan kelompok tani memperoleh legitimasi dalam pengelolaan hutan, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan, dipraktikkan Kelompok Tani Hutan (KTH) selama berpartisipasi dalam pengelolaan Tahura. Kepercayaan yang terjalin antara KTH dan petugas balai Tahura mampu mengubah pandangan masyarakat terkait hutan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Adanya Kelompok Tani Hutan (KTH) dapat memberikan benefit secara ekonomi terhadap masyarakat. Dalam pengelolaan Tahura juga diterapkan norma-norma yang harus ditaati oleh masyarakat. Adanya norma yang dibentuk menjadi landasan semua pihak untuk tetap menjaga hutan tetap lestari. Jalannya pengelolaan Tahura tidak lepas dari peran kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Gotong royong yang diterapkan Kelompok Tani Hutan (KTH) mampu mendorong keberhasilan pengelolaan tahura. Interaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak lain seperti petugas balai tahura dan Pertamina. Interaksi ini terjalin dengan baik sehingga pengelolaan Tahura dapat berjalan lebih optimal. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti selanjutnya disarankan dapat mengumpulkan data secara bertahap dan lebih mendalam. Penelitian dapat dilakukan dengan memperluas lingkup penelitian agar dapat mengetahui aspek unsur modal sosial lain bagi masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Indah dan Green Lawu, pihak Tahura KGPAA Mangkunagoro I yang telah bersedia memberikan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.

Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.



- Dahal, G. R., & Adhikari, K. P. (2008). Bridging, linking, and bonding social capital in collective action: The case of Kalahan Forest Reserve in the Philippines.
- Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Fitriandhini, D., & Putra, A. (2022). Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Oleh Aktivitas Manusia: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 3(3), 217-226.
- Febryanti, W. O. I., Adiningsi, S., & Saputra, R. A. (2023). Menganalisis Pola Deforestasi Hutan Lindung Di Sulawesi Tenggara Menggunakan Metode K-Means. *Jurnal Informatika Polinema*, 10(1).
- Hapsari, N. T., & Rokhani, R. (2021). Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Santuso II Dalam Pengembangan Kapulaga Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. *Jurnal Kirana*, 1(2), 92-104.
- Harjana, A. T., Setiawati, S., Kristiningrum, R., & Sardjono, M. A. (2024). Penilaian modal sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Sinar Nilam dalam pemanfaatan hutan mangrove. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 16-29.
- Herdiyanti, Saputra, P. P. (2023). Peran Modal Sosial Dalam Memperkuat Jaringan Kelompok Tani Hutan (KTH) Di Kampung Kapitan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 333-338.
- Kurniawan, A. (2020). Pengembangan Objek Wisata Tahura KGPA Mangkunegoro I Berbasis Edukasi Kesehatan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sabar, A., Dassir, M., & Ita, S. E. N. (2022). Modal Sosial Masyarakat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Buhung Lali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 8(1), 94-101.
- Saputra, P. P. (2023). Peran Modal Sosial Dalam Memperkuat Jaringan Kelompok Tani Hutan (KTH) Di Kampung Kapitan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 333-338.
- Sari, B. B. P. (2024, 11 Juli). Siti Nurbaya Sebut Penetapan Kawasan Hutan di Indonesia Capai 84 Persen. Diakses pada Selasa, 5 November 2024, dari <https://news.detik.com/berita>
- Subagyo, S. (2012). Pengembangan nilai dan tradisi gotong royong dalam bingkai konservasi nilai budaya. *Indonesian journal of Conservation*, 1(1), 61-68.
- Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (1990).
- Widiyanto, H. (2015). Kajian sensitifitas kawasan taman hutan raya (Tahura) KGPA Mangkunagoro I Karanganyar (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).